

## MEMUPUK NASIONALISME DALAM INDUSTRI PERTAHANAN

Manan<sup>1</sup>, Gathut Imam Gunadi<sup>2</sup>, G. Royke Deksono<sup>3</sup>

Industri Pertahanan, Fakultas Teknik Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik  
Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [mananpelitabangsa@gmail.com](mailto:mananpelitabangsa@gmail.com)<sup>1</sup> [gathut@gmail.com](mailto:gathut@gmail.com)<sup>2</sup> [georgeroykedeksino@gmail.com](mailto:georgeroykedeksino@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Dalam mewujudkan komitmen dalam membangun kapabilitas dalam bidang pertahanan, Indonesia melakukan berbagai upaya dalam menetapkan sasaran pokok jangka panjang untuk membangun kemandirian industri pertahanan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menerbitkan UU no. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Tidak hanya itu saja, Pemerintah juga sudah membentuk Komite Kebijakan Industri pertahanan atau sering disebut dengan KKIP yang bertugas mewujudkan kemandirian Industri pertahanan yang menghubungkan kedua belah pihak yang membutuhkan yaitu Alpalhankam dan bagian pengembangan industri strategis dalam negeri. Nasionalisme dalam bidang Industri pertahanan mempunyai kemampuan memproduksi Alpalhankam yang tidak bergantung pada negara lain merupakan target pemerintah Indonesia dalam bidang industri pertahanan yang ada di Indonesia. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam pemenuhan kebutuhan militer dengan melihat kapasitas industri pertahanan yang ada di Indonesia. Salah satu strategi lainnya adalah dengan membangun dan menanamkan nilai nasionalisme dalam industri pertahanan sehingga upaya tersebut dapat membangun industri pertahanan nasional yang tidak hanya mengembangkan Alpalhankam melalui pengadaan namun juga melalui pemberdayaan industri pertahanan dengan cara penanaman rasa nasionalisme dan bela negara.

**Kata Kunci:** Nasionalisme, Industri Pertahanan, Alpalhankam

### Abstract

*Indonesia is currently trying to realize its commitment to building defense capabilities by setting long-term main goals to build the independence of the defense industry. In addition to issuing Law no. 16 of 2012 concerning the Defense Industry, the government also established the Defense Industry Policy Committee (KKIP) which is tasked with realizing the independence of the defense industry by bridging the needs of Alpalhankam and the development of domestic strategic industries. The military embargo imposed by the United States from 1995 to 2005 has made the Indonesian government aware of the importance of the nationalism of strategic industries for the defense system. The nationalism of the defense industry or the ability to produce its defense and security equipment without relying on other countries is one of the targets of the Indonesian government in the defense sector. Nevertheless, there are still some challenges in meeting military needs with the capacity of the defense industry. One strategy in responding to these challenges is to build and instill the values of nationalism in the defense industry so that efforts to empower the national defense industry will not only develop defense equipment through procurement but also through empowering the defense industry by inculcating the values of nationalism in the people involved. in the whole process of activities in the defense industry to state revenue.*

**Keywords:** Nationalism, Defense industry, Alpalhankam.



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Nasionalisme adalah suatu doktrin pada suatu bangsa yang tertanam dari keinsyafan dan kesadaran diri sendiri yang mencintai bangsa dan negaranya dengan diwujudkan mulai dari pemikiran, sikap, ucapan sampai dengan tindakan yang ikhlas rela berkorban karena rasa cintanya kepada bangsa dan negaranya, dilakukan untuk meraih kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, memajukan bangsa dan negaranya, guna mencapai kemakmuran bersama dan

disegani oleh bangsa lain serta ikut memelihara perdamaian dunia. Rasa nasional itu tidak timbul dengan sendirinya, tetapi ada beberapa faktor penyebabnya dari bangsa itu sendiri atau dari pengalaman perjalanan suatu bangsa lain yang saling melengkapi.

Melihat gagalnya pergerakan sporadis yang bersifat kedaerahan, memunculkan gagasan untuk mendirikan pergerakan yang bersifat nasionalis seperti perkumpulan Budi Utomo yang dulunya didirikan oleh dr. Wahidin Sudirohusodo menjadi salah satu tokoh pergerakan nasional sebagai cendekiawan Indonesia yang pernah menyatakan bahwa bangsa Indonesia perlu dicerdaskan dengan mengatakan mencerdaskan bangsanya.

Budi utomo merupakan organisasi yang menjadi salah satu yang memberikan pengaruh besar terhadap gerakan yang melatar belakangi pergerakan nasional lainnya seperti gerakan nasional dengan dalih agama seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama maupun gerakan-gerakan yang lain seperti Sumpah pemuda, BPUPKI serta PPKI.

Ada pula faktor yang terjadi dari luar yang menjadi latar belakang nasionalisme yang berada di Indonesia salah satunya adalah menyerahnya pasukan Belanda terhadap Jepang di era Perang Dunia 2. Kekalahan Belanda ini tentu saja menjadi pendorong dan motivasi bahwa suatu bangsa kecil di Asia dapat mengalahkan bangsa Eropa dan membuat Negara-negara jajahan bangsa eropa yang ingin merdeka dan berdaulat benar-benar merdeka dan berdaulat termasuk Indonesia.

Namun, tidak cukup sampai disana. Belanda kembali lagi untuk melakukan penjajahan kembali. Namun, tokoh-tokoh lundonesia beserta rakyat Indonesia mengobarkan semangat Nasionalisme untuk memberikan perlawanan pada saat itu juga seperti yang terjadi di Bandung yang sering disebut dengan Bandung Lautan Api, atau di Surabaya yang dilakukan oleh Bung Tomo dan rekan-rekannya dan lain sebagainya.

Setelah Indonesia merdeka sepenuhnya, maka dimulailah pembangunan negara Indonesia dengan mengambilalih beberapa perusahaan milik Belanda termasuk Industri Pertahanan yang pada awalnya didasari oleh kebutuhan Pemerintah Kolonial Belanda yang pada awalnya dijadikan sarana dan prasarana, dilakukan pemeliharaan dan perbaikan seluruh sarana dan prasarana perang yang pernah digunakan pada saat penjajahan Hindia Belanda. Pengambil alihan industri pertahanan merupakan salah satu bentuk rasa Nasionalisme pada waktu Itu dan mengubah nama beberapa industri pertahanan misalnya CW atau sering di sebut dengan Constructie Winkel yang didirikan oleh Daendels di Surabaya sekarang menjadi PT Pindad, ME yang juga sering disebut Marine Establishment di Surabaya berubah nama menjadi PT PAL Indonesia (Persero) dan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) sebagai industri pertahanan matra udara ketika Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Bagian Uji Terbang di Surabaya yang memiliki tugas untuk mempelajari kinerja pesawat terbang.

Namun, seiring berjalannya waktu, lembaga tersebut kerap kali berganti nama maupun fungsi seperti LAPIP atau yang dikenal sebagai Lembaga Persiapan Industri Penerbangan, LIPNUR yang juga disebut Lembaga Industri Pesawat Terbang Nurtanio. Selain mengambilalih industri pertahanan tersebut yang akhirnya dinasionlisasikan yaitu dikelola oleh bangsa bangsa Indonesia sendiri, juga pada perkembangannya sebagai wujud rasa nasionalisme bangsa Indonesia yaitu dengan mengolah bahan-bahan mentah dari dalam negeri. Dan dengan mencintai produk dalam negeri yaitu dengan menggunakan produk industri pertahanan dalam negeri sendiri juga sebagian menjadikan pendapatan negara dengan menjual produksi industri pertahanan ke negara lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka peneliti ingin mengkaji tentang pertama, bagaimana sejarah dan bentuk nasionalisme itu diterapkan pada Industri Pertahanan dan penggunaan hasil produksinya di Indonesia? Kedua, bagaimanakah

upaya dalam meningkatkan kemampuan industry pertahanan tersebut pada masa depan dengan tidak menghilangkan rasa nasionalisme tersebut. Tujuan Penelitian. Pertama, untuk mengetahui wujud nasionalisme pada industri pertahanan. Kedua, untuk mengetahui dan upaya-upaya untuk meningkatkan rasa nasionalisme pada Industri Pertahanan kedepannya.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan cara mengumpulkan, menganalisis serta menafsirkan data non-numerik menjadi kata-kata sehingga pembaca dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh penulis dalam tulisan ini. Cara penulis mengumpulkan data penelitian adalah dengan menggunakan catatan harian, literature review dan juga berbagai referensi yang dapat digunakan sesuai dengan topik penelitian yang penulis ingin teliti.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Pengertian Nasionalisme menurut para ahli.

#### 1. Boyd Shafer

- Nasionalisme merupakan salah satu rasa cinta tanah air, ras, bahasa dan budaya yang ada di negara dimana tempat kita dilahirkan. Maka dari itu makna dari nasionalisme dengan patriotisme sama menurut Shafer.
- Nasionalisme juga sebuah doktrin yang menyatakan bahwa bangsanyalah yang paling dominan dan paling unggul dari bangsa yang lain. Doktrin tersebut juga dibuktikan dengan tindakan yang agresif dengan bukti yang ada.
- Nasionalisme merupakan dogma yang diajarkan oleh suatu individu maupun kelompok kepada suatu individu atau kelompok yang lain bahwa mereka hidup untuk negara dan bangsanya.
- Nasionalisme juga dapat diartikan sebagai suatu kebaktian terhadap organisasi sosial yang kabur, atau bahkan sesuatu yang dikodrati sebagai bangsa yang lebih unggul dari bangsa yang lain.
- Nasionalisme merupakan suatu keinginan untuk merdeka secara politik, merdeka akan keselamatan dan merdeka dalam prestise tertentu.

#### 2. John Hutchinson, Nasionalisme adalah suatu fenomena budaya yang dapat dijadikan fenomena politik.

#### 3. Green Field dan Chirrot, Nasionalisme merupakan suatu gagasan yang dapat membentuk konsep tentang identitas nasional. Sehingga identitas tersebut dapat terbentuk seperti agama, suku kelas dan lain-lain.

#### 4. Kedourie, Nasionalisme adalah suatu doktrin yang dapat memberikan kriteria penduduk yang dapat menikmati suatu pemerintahan bagi dirinya sebagai pelaksana suatu kekuasaan dalam sebuah negara dan memberikan hak terhadap masyarakat negaranya

#### 5. Abdurrachman Surjomiharjo, Nasionalisme sebagai suatu paham kebangsaan dimana terdapat keinginan untuk bebas dari suatu jajahan penjajah dikarenakan adanya perbedaan antara yang dijajah dan penjajah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Nasionalisme dapat disebut dengan salah satu paham kebangsaan dari suatu masyarakat disebuah negara yang memiliki rasa membela negaranya dari suatu penjajahan dengan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang bisa juga ditunjukkan melalui berbagai tingkah laku maupun sikap dari setiap individu maupun kelompok masyarakat untuk rela berkorban demi kemajuan bangsa dan negaranya.

## Faktor-Faktor yang menimbulkan rasa Nasionalisme

### 1. Faktor dari bangsa sendiri

- a. Kejayaan Masa Lalu : Di masa lalu, bangsa Asia Afrika ini adalah salah satu bangsa yang pernah mengalami suatu kejayaan sebelum masuknya kolonialisme maupun imperialisme. Salah satu contohnya adalah Indonesia yang dahulu juga pernah berjaya pada zaman kerajaan Majapahit yang hampir wilayahnya di sekitar pulau Jawa. Ada juga kerajaan Sriwijaya yang menguasai Pulau Sumatera yang dahulu merupakan kerajaan yang kokoh dan berdaulat di berbagai wilayah di Nusantara yang juga terkenal dalam kekuatan maritimnya.
- b. Munculnya kaum terpelajar: Perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia juga menjadi salah satu faktor yang dapat menimbulkan rasa patriotisme. Di Indonesia, kaum pelajar akan menjadi penggerak dari seorang pemimpin dari sebuah organisasi yang bergerak dalam melawan kolonialisme.
- c. Perasaan yang Sama dan Sepenanggungan: Penderitaan dan kesengsaraan dari beberapa bentuk-bentuk kolonialisme/imperialisme bangsa Eropa yang akan menjadi rakyat dengan tekad yang kuat untuk menentang imperialisme barat.
- d. Berkembangnya Rasa Nasionalisme dalam bidang pendidikan yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu contohnya adalah pada bidang sosial ekonomi yang menyuarakan perihal harus dihapusnya eksploitasi asing terhadap sumber daya alam yang ada di Indonesia sehingga masyarakat setempat dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk menunjang kebutuhannya. Dalam bidang politik juga telah menyuarakan suara rakyat pribumi yang harus terbebas dari penderitaan yang dilakukan oleh kaum selain pribumi. Dan juga dari bidang kebudayaan yang sudah melakukan aksi seperti melindungi kebudayaan yang telah diberikan secara turun temurun dan mengembalikan budaya yang telah dilupakan dan digantikan oleh budaya asing.

### 2. Faktor dari bangsa lain.

- a. Munculnya Paham-Paham Baru : Paham baru yang bermunculan di Indonesia seperti paham nasionalisme serta komunisme yang pernah digunakan di berbagai organisasi dalam gerakan nasional Indonesia.
- b. Kemenangan Jepang atas Rusia : Kemenangan Jepang dalam peperangannya melawan Rusia dapat membuat seluruh negara yang berada di Asia Afrika memiliki semangat dalam melawan penjajahan di negerinya sendiri.
- c. Perkembangan Nasionalisme di Berbagai Negara: Semakin berkembang dan menyebarnya paham nasionalisme yang ada di Asia-Afrika membuat banyaknya suatu pergerakan nasional yang mendukung paham nasionalisme.

## Pembahasan

Sejarah industri Pertahanan Nasional di Indonesia diawali dan disari dari kebutuhan Koloni Belanda saat menjajah Indonesia yang membutuhkan pemeliharaan dan perbaikan alat perang yang digunakan dalam menjajah wilayah Hindia Belanda. Namun, dalam catatan sejarah, Industri Pertahanan pada akhirnya diarahkan untuk menghasilkan peralatan-peralatan pertahanan dan pendukung yang digunakan untuk menjajah seperti kendaraan darat, kapal untuk berperang, pesawat tempur dan peralatan-peralatan lain yang dapat mendukung peperangan selama penjajahan Hindia Belanda.

Dituliskan dalam sejarah bahwa PT. Pindad (Persero) yang awal mulanya menjadi industri pertahanan darat diawali dengan bengkel perbaikan senjata yang bernama CW atau

sering disebut dengan *Constructie Winkel* di dirikan oleh Daendels pada tahun 1808 di Surabaya. Dengan seiringnya waktu, CW serta bengkel amunisi PF atau sering disebut dengan *Proyektiel Fabriek* serta bengkel pembuatan dan perbaikan amunisi serta bahan peledak PW atau kerap disebut dengan *Pyrotechnische Werkplaats* yang menjadi satu setelah digabung dengan AI atau *Artillerie Inrichlingen* menjelang perang dunia 1 di pindah lokasikan di Bandung dengan alasan keamanan dan strategi perang.

PT. PAL Indonesia (Persero) pada awalnya merupakan sebuah galangan kapal yang disingkat dengan ME atau *Marine Establishment* bermula pada tahun 1939 yang didirikan di Surabaya memiliki tugas dan fungsi dalam perawatan serta perbaikan kapal laut yang sudah pernah digunakan sebagai armada Angkatan Laut Hindia Belanda. Seiring dengan berjalannya waktu, ME berganti nama menjadi Kaigun SE 2124 dan kemudian pada 1961 dirubah namanya menjadi Penataran Angkatan Laut atau PAL.

Sejarah PT. Dirgantara Indonesia (Persero) sebagai industri pertahanan udara dimulai pada tahun 1914 ketika pemerintah Hindia Belanda mendirikan seksi uji terbang di Surabaya yang bertugas mempelajari kinerja pesawat terbang. Dalam uraiannya, badan tersebut berubah nama dan fungsinya menjadi Lembaga Persiapan Industri Penerbangan (LAPIP) pada tahun 1964 dan Lembaga Industri Pesawat Terbang Nurtanio (LIPNUR) pada tahun 1966 (Nurgiansah & Rachman, 2022).

Sejarah PT. Dahana (Persero), pelopor dalam industri bahan peledak, didirikan pada tahun 1964 di Tasikmalaya. Berawal dari proyek kerjasama antara Angkatan Udara Indonesia (AURI) dan Ispanosiza (Swiss), proyek ini awalnya ditujukan untuk membangun pabrik roket yang ditujukan untuk kepentingan Operasi Trikora dan Operasi Dwicola. Pengembangan tersebut juga menghasilkan produk bahan peledak sebagai produk sampingan. Pabrik yang kemudian diberi nama Dahana itu berkembang menjadi produsen bahan peledak. Produk utamanya adalah dinamit untuk keperluan pertambangan.

Dengan perjalanan sejarah Indonesia, industri-industri tersebut telah mengalami pasang surut dalam kegiatan usahanya. Namun, pada tahun 1980-an, industri pertahanan merupakan masa keemasan karena semua industri tersebut diintegrasikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1989 di bawah Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) agar lebih efisien dan berdaya saing di pasar global. Saya mengalami masa-masa itu.

Namun, krisis keuangan yang melanda Indonesia pada tahun 1998 berdampak pada industri pertahanan. Untuk menyelamatkan keuangan negara, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Statement of Intent (LoI) dengan International Monetary Fund (IMF). Ini adalah akhir dari pendanaan nasional untuk industri strategis nasional dan masyarakat. Karena kurangnya kontrol pemerintah akibat hilangnya mayoritas saham yang dimiliki oleh pemerintah, industri strategis ini melakukan diversifikasi usaha ke arah produksi peralatan swasta dalam upaya untuk bertahan hidup akibat kondisi keuangan internal yang tidak menentu. sawah.

Untuk memulihkan kapasitas industri pertahanan dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada alpha lancam buatan asing, Kabinet Indonesia I di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai menjadikan industri pertahanan sebagai prioritas pembangunan. Pemerintah menerima dan memberikan kesempatan yang besar kepada pihak swasta untuk terlibat dalam kegiatan industri pertahanan. Upaya ini dilanjutkan oleh Kabinet Indonesia II Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2010 diterbitkan dalam surat kabar harian yang diketuai oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang diketuai Presiden dan Menteri Pertahanan. Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Komando Militer Republik Indonesia. Status sekretaris KKIP dijabat oleh Wakil Menteri Pertahanan. Alasan dibentuknya KKIP adalah karena

pengembangan industri pertahanan memerlukan keterlibatan berbagai kementerian tersebut di atas dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), termasuk anggota seperti Kementerian Perindustrian, sebagai pimpinan. Jika produk diproduksi di dalam negeri dan ada pesanan tambahan (repeat order), industri dalam negeri sudah memiliki standar militer yang tampaknya memenuhi spesifikasi. Di sini, KKIP membuat kriteria yang sama. Ini karena beberapa produk memiliki referensi kinerja, tetapi penting juga untuk dicatat bahwa tidak semua produk pertahanan memiliki standar yang sama. Secara umum, yang disebut Alutsista sebenarnya adalah peralatan tempur, tetapi Non Combat berarti sistem pertahanan pendukung. Dengan kata lain, pertempuran (alat perang) meliputi senjata, kapal perang, tank, dan senjata. Ini termasuk non-tempur seperti tanker, pakaian, parasit, ransel, makanan (jatah) dan peralatan telekomunikasi.

Sebagai wujud nasionalisme dalam industri pertahanan, produk menggunakan komposisi bahan baku dari dalam negeri dengan mengukur Tingkat Kandungan Nasional (TKDN). Karena berbagai macam produk, perlu untuk mengukur kebutuhan produk. Dijual seolah-olah ada semacam transfer. Pembiayaan dalam bentuk teknologi, atau offset dan countertrade. Ketiganya termasuk Kekuatan Esensial Minimum. Ini karena ada cara untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan. Pencapaian MEF membutuhkan biaya baik berupa mekanisme pinjaman dalam negeri, pinjaman utang luar negeri, dan kredit ekspor. Dan digunakan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas industri pertahanan Indonesia.

Oleh karena itu, kebijakan ini dikuatkan oleh Undang-Undang Industri Pertahanan yang memuat kewajiban menggunakan produk yang dapat diproduksi di Indonesia. Dengan kata lain, jika produk tersebut tidak dapat diproduksi di Indonesia, pembelian harus disertai dengan offset, transfer teknologi, atau countertrade skim. Jika seimbang, Indonesia memiliki peran dalam menggarap proyek tersebut. Offset terdiri dari offset langsung dan offset tidak langsung. Mekanisme offset dipilih karena dapat meminimalkan biaya yang harus ditanggung bahkan diharapkan dapat menjadi sumber devisa. Selain itu, offset juga mendorong atau mempertahankan tingkat ketersediaan lapangan kerja di industri dalam negeri.

Offset juga dapat memberikan proses alih teknologi, yaitu peralatan teknis yang dipelajari dan peluang peralatan teknis yang ingin dipelajari. Yang dikendalikan termasuk beberapa senjata SS, beberapa di antaranya diekspor dan mengontrol produksi suku cadang untuk kapal patroli berkecepatan tinggi dan kapal kelas korvet. Teknologi pertahanan senantiasa didorong oleh kemampuan penangkalan untuk dapat menjawab tuntutan ataupun ancaman yang senantiasa berubah. Oleh karena itu, produk pertahanan selalu menjadi state of the art dan merupakan pioneer bagi aplikasi teknologi lainnya. Dalam konteks tersebut, suatu negara yang memiliki industri pertahanan yang mapan dianggap memiliki sebuah keuntungan strategis dalam tatanan global atau dunia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 memberikan peluang besar untuk memberdayakan dan mendorong pertumbuhan industri padat modal, padat karya, dan padat teknologi untuk bergerak di bidang industri pertahanan. Indonesia juga merupakan payung hukum yang menjadikan Indonesia lebih mandiri, unggul dan berdaya saing dalam industri pertahanan Indonesia, terutama dalam hal siap memproduksi alutsista untuk alutsista yang lebih berkualitas menjadi (Alutsista). Undang-undang mengatur beberapa ketentuan, seperti dalam hal pembiayaan. Selain itu, ada pasal yang mengatur lokasi produksi yang disesuaikan dengan kapasitas BUMN, seperti produksi senjata, untuk memenuhi kebutuhan TNI AU produksi PT Dirgantara Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana TNI Angkatan Laut diproduksi di PT PAL dan sarana yang dibutuhkan TNI Angkatan Darat diproduksi di PT PINDAD. Melalui penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 dan

peraturan perundang-undangan terkait lainnya secara konsisten, industri pertahanan yang maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing dapat mengetahui seberapa besar kapasitas produksi alutsista Indonesia yang diharapkan. diperhatikan. Pada akhirnya akan bermuara pada terwujudnya kemandirian untuk memenuhi kebutuhan Alparhankham, tergantung kebutuhan TNI, Polisi dan kementerian lainnya.

Memasuki pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo mempunyai Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi dasar dari kerja sama yang lebih komprehensif antara industri pertahanan swasta dan milik negara. Terbentuknya ekosistem industri pertahanan diharapkan bisa mempercepat penguasaan teknologi pertahanan. Kolaborasi antar industri terutama di dalam negeri sejalan dengan rencana jangka panjang membangun ekosistem industri pertahanan. Dalam rencana strategis pembangunan kekuatan pertahanan sebelumnya, fokus ada pada pengadaan alat yang dibutuhkan. Akan tetapi, ke depan arah pemerintah adalah belanja pertahanan harus menjadi investasi. Proses belanja alat pertahanan harus menjadi bagian dari pembangunan kekuatan industri pertahanan. Sebagai contoh kerja sama antara PT Infoglobal Teknologi Semesta (perusahaan swasta) dan PT Nusantara Turbin dan Propulsi (anak perusahaan PT Dirgantara Indonesia, BUMN). Kerja sama keduanya untuk memperpanjang mesin dan avionik dari pesawat tempur TNI AU Hawk 109/209. Ini merupakan terobosan karena bisa menjadikan Indonesia mampu melakukan pemeliharaan secara mandiri.

## KESIMPULAN

Pengembangan Industri Pertahanan selain didukung oleh pengembangan teknologi, pendanaan, peraturan-peraturan, keikutsertaan sektor swasta, juga harus ditanamkan nilai-nilai nasionalisme pada insan-insan yang menjalankan seluruh proses kegiatan industri pertahanan. Nasionalisme pada Industri pertahanan dimulai pada saat pengambilalihan pengelolaan pada Industri milik Belanda ke pemerintah Indonesia, yang pada saat itu digunakan untuk dukungan perang dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua Nasionalisme Industri pertahanan mengalami masa relatif kemajuan pada tahun 1980, karena pada waktu itu situasi negara dalam keadaan kondusif dan rasa nilai nasionalisme yang tinggi dalam membangun industri pertahanan sehingga dapat mengekspor Pesawat CN 235 ke negara lainnya. Ketiga Nasionalisme Industri pertahanan yaitu dengan pengambil alihan saham-saham yang sebelumnya dilepas kepada publik akibat terjadinya krisis moneter. Keempat Nasionalisme Industri pertahanan yaitu dengan memberikan peluang besar dan menjadi akselerator bagi pemberdayaan dan pertumbuhan industri-industri padat modal, padat karya dan padat teknologi untuk bergerak di sektor Industri Pertahanan, kelima Nasionalisme Industri pertahanan yaitu melalui kerja sama yang lebih komprehensif antara industri pertahanan swasta dan milik negara (BUMN) dengan Kolaborasi antar industri terutama di dalam negeri sehingga terbentuknya ekosistem industri pertahanan yang diharapkan bisa memproduksi Alparhankham dengan teknologi maju dan canggih sesuai dengan perkembangan jaman, sehingga dapat digunakan untuk kehandalan pertahanan negara maupun untuk komoditi ekspor yang akan menghasilkan pendapatan negara.

Selanjutnya penanaman nilai-nilai nasionalisme pada Industri Pertahanan untuk kedepan yaitu nilai-nilai nasionalisme itu dapat mencegah penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan bangsa dan Negara, dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut: {1} Mencegah praktek korupsi yang hanya memperkaya diri sendiri atau kelompoknya yang tentunya karena belum sesuai dengan nilai-nilai nasionalisme yang menanamkan untuk kepentingan negara dan bangsa, {2} meminimalisir penggunaan bahan baku dari impor negara lain, karena nilai-nilai nasionalisme menanamkan penggunaan bahan

baku dari dalam negeri, {3} menghindari produk Alpalhankam dari impor negara lain, yang penuh dengan berbagai kepentingan dan rawan akan embargo suku cadang dan peralatan pendukung lainnya karena nilai-nilai nasionalisme menanamkan mencintai pada produk dalam negeri, {4} tidak menjual saham pada industri pertahanan kepada negara lain karena tidak sesuai dengan nilai – nilai nasionalisme yang lebih mengutamakan untuk kepentingan negara dan bangsa, {5} tidak menjual hasil produk Alpalhankam dalam negeri kepada kelompok non nasionalis dan kelompok terorisme seperti separatis OPM Papua, Gam Aceh, Al Qaeda, karena nantinya akan digunakan untuk memisahkan diri dari NKRI atau membuat terror kepada masyarakat yang tidak sepeham dengan ideologisnya.

Akhirnya, Memupuk nilai-nilai nasionalisme wajib ditanamkan secara komprehensif pada aspek-aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis dalam insan industri pertahanan, tidak sekedar suatu proses yang ditujukan untuk publikasi, namun diimplementasikan menjangkau wahana yang lebih luas yang berdampak bagi kemajuan bangsa dan negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni Kusumawardani & Faturachman, 2004, NASIONALISME, Tahun XII, No. 2, Desember 2004, Jakarta :Buletin Psikologi
- Aset perusahaan sektor pertahanan hanya 17,3 Triliun, Budget Issue Brief Vol 01,Ed 8, Politik dan Keamanan, Mei 2021 diakses dari <https://www.alinea.id/nasional/hanya-54-perusahaan-pertahanan-yang-aktif-saat-inidari-102-b1XpL9oQH>, 26 Maret 2021
- <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/industri-pertahanan-sejarahperkembangan-dan-tantangan>
- [https://nasional.sindonews.com/berita/683641/18/korupsi-memudarnya-nasionalisme dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/11/12104441/pentingnya-nasionalisme-dan-patriotisme-di-era-new-normal?page=all>](https://nasional.sindonews.com/berita/683641/18/korupsi-memudarnya-nasionalisme-dari-https://nasional.kompas.com/read/2020/06/11/12104441/pentingnya-nasionalisme-dan-patriotisme-di-era-new-normal?page=all)
- <https://www.kkip.go.id/2020/05/11/6-strategi-membangundaya-saing-industri-pertahanan-indonesia-di-pasar-internasional-1/#> Kompas. 2020. Industri Pertahanan: Sejarah, Perkembangan dan Tantangan,
- Kajian Kebijakan Alutsista Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia Silmy, Karim. 2020. Keppres No.56/1989tentang Pembentukan Dewan Pembina Industri Strategis
- Kumparan. 2020. Impor Senjata RI Salah Satu yang Terbesar di Dunia-dan Diminta Jokowi Direm, diakses dari <https://kumparan.com/kumparanbisnis/impor-senjata-ri-salah-satuyang-terbesar-di-dunia-dan-diminta-jokowi-direm-1tmi7FsxgFr/full> LIPI. 2012.
- Mewujudkan Industri Pertahanan Yang Kuat, Mandiri Dan Berdaya Saing Dalam Mendukung Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (MEF) TNI.
- Nurgiansah, T. H., & Rachman, F. (2022). Nasionalisme Warga Muda di Era Globalisasi: Pendidikan Kewarganegaraan di Perbatasan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 19(1), 66–75. <https://doi.org/10.24114/jk.v19i1.33214>
- Perpres No.42/2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan
- Sindonews. 2018. Pengusaha Swasta Nasional Pamerkan Produk Industri Pertahanan, diakses dari <https://nasional.sindonews.com/berita/1283913/14/pengusaha-swasta-nasionalpamerkan-produk-industri-pertahanan>
- Stockholm International Peace Institute (SIPRI). SIPRI Databases, diakses dari <https://www.sipri.org/databases> Yanto, Sri. 2019.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
- Wira: Media Informasi Kementerian Pertahanan. Edisi Khusus 2019:Hal44 Alinea. 2019.